



Ribuan RTLH Belum Kena Perbaikan

BANTUL— Anggaran daerah yang cuma cukup untuk memperbaiki puluhan rumah tidak layak huni (RTLH) membuat ribuan RTLH lainnya belum tersentuh program perbaikan.

Kepala Bidang Perumahan dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul Erwin Prasmanta menyampaikan keberadaan RTLH sekitar 2.000 unit yang tersebar di berbagai kapanewon.

Selama ini penanganan RTLH hanya dilakukan secara bertahap lantaran ketersediaan anggaran

penanganan yang terbatas. Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul cuma bisa menangani perbaikan 90 unit RTLH.

"Tahun ini ada dana perbaikan dari APBD. Tidak ada penanganan kawasan kumuh dengan Dana Alokasi Khusus [DAK]," ujarnya, Selasa (11/2). Penanganan RTLH dengan DAK mensyaratkan rumah itu harus berada dalam kawasan kumuh dengan luas minimal 10 hektare (ha).

Namun, lantaran keberadaan RTLH tersebar di berbagai kapanewon menyebabkan tidak ada satu lokasi

yang dapat dikatakan kawasan kumuh dengan luas lahan mencapai 10 ha. Karena itu, alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk perbaikan RTLH hanya berasal dari APBD.

Untuk satu unit RTLH yang dibangun sebagian akan diberikan alokasi anggaran mencapai Rp20 juta per unit sementara untuk pembangunan baru mencapai Rp35 juta per unit.

Jumlah anggaran tersebut pun dinilai belum mampu memenuhi biaya yang dikeluarkan pemilik rumah untuk perbaikan rumah. Kondisi rumah yang perlu penangan

tersebut mengalami kerusakan pada atap, dinding dan lantai.

Beberapa rumah bahkan masih menggunakan atap dari seng dan berlantai tanah. Beberapa juga ada yang belum memiliki kamar mandi di dalam rumah. "Kalau kurang, pemilik harus siap dana sendiri [untuk perbaikan RTLH]," ujarnya.

Erwin mengaku selama ini DPUPKP menangani RTLH berdasarkan usulan dari masyarakat. Masyarakat dapat mengusulkan ke kalurahan untuk penanganan RTLH kemudian kalurahan dapat mengusulkan ke Pemkab. (Stefani Yulindriani)